

---

# Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI

---

Bedah Buku \"Breakthrough: Tujuh Kunci Utama Membangun Bisnis\" POJOK LITERASI : BEDAH BUKU SEKOLAH BERNAMA IBU DAN SEBUAH PEKERJAAN BERNAMA AYAH Menuju ZI-WBK Sekretariat Direktorat Jenderal Anggaran 1. Askolani Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI #MembangunDemiKeadilan #FMB9 Konsultasi Publik Rancangan Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2025 Gedung Dhanapala Sutikno Slamet - Gedung Direktorat Jenderal Anggaran - Kementerian Keuangan [SOSIALISASI] Sosialisasi dan Bedah Buku MOFIN Tahun 2021 Hari ke-1 Testimoni Direktorat Jenderal Anggaran (DJA), Kementerian Keuangan terhadap Program TPBIS PENGINPUTAN DAN PENGUKURAN INDEKS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH TAHUN 2024 WKU Seri 48 | Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah [LIVE] - PMO Informal Meeting (PIM) II Tahun 2021 - \"Cakap Berkomunikasi di Masa Pandemi\" Kuliah

Umum | Bp. Askolani S.E., M.A. - Direktur Jenderal Anggaran WKU Seri 38 | Pedum APBD 2024 - Jaminan Kesehatan Nasional Tahap 2 Podcast Intress-Think: Integrasi Pelaporan Kinerja pada Pelaporan Keuangan [KePo] | Usai UU - HKPD \u0026amp; PP Nomor 35/2023 diketok, pemda bikin apa? SERAGAM BARU KEMENTERIAN KEUANGAN [Treasury Mini Seminar] Bedah Buku: Bunga Rampai Badan Layanan Umum (BLU) Digi-Pay Optimalkan Pengelolaan Kas Negara dan Kembangkan UMKM [SOSIALISASI] Sosialisasi dan Bedah Buku MOFIN Tahun 2021 Hari ke-2 Tutorial Aplikasi SMART - Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Privats Training Angular Development Fundamentals bersama Direktorat Jenderal Anggaran Anggaran Bansos beras, daging ayam, dan telur capai Rp 17,5 T KLF 2021 - Bedah Buku Biografi Profesional Marwanto Harjowiryono Maestro Simfoni Perbendaharaan 2. Askolani Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Highlight Kuliah Umum | Bp. Askolani S.E., M.A. - Direktur Jenderal Anggaran Kepastian Gaji PNS Naik Diumumkan 16 Agustus 1. Askolani Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu Kemenkeu Menari 2020 : Direktorat Jenderal Anggaran Kemenkeu Pastikan PNPB 2024 Fokus pada Lingkungan dan Layanan Majalah MACEPACE Papua Barat Edisi Januari 2023 Sistem Akuntansi Pemerintah pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara Majalah MACEPACE Papua Barat Edisi Juni 2023

Manajemen Keuangan Satuan Kerja Luar Negeri  
Cerita Tiga Menteri Menghadapi Krisis  
Majalah MACEPACE Papua Barat Edisi Agustus  
2023

Direktorat Jenderal Anggaran dari masa ke masa,  
1966-1999

Administrasi keuangan Republik Indonesia  
Himpunan keputusan Menteri Keuangan Republik  
Indonesia tentang susunan organisasi dan tata  
kerja Departemen Keuangan

Interkoneksi Proses Bisnis Perbendaharaan pada  
Bendahara Umum Negara dengan Satuan Kerja  
selaku Kuasa Pengguna Anggaran

Laporan hasil kajian bidang hukum ekonomi  
pembangunan

Evaluasi Atas Implementasi Aplikasi Sistem  
Akuntansi Instansi Basis Akrual (SAIBA) Dengan  
Pendekatan Delone & McLean Information System  
Success Model (Studi Kasus Mitra Kerja KPPN  
Gorontalo dan Marisa) (Evaluation on  
Implementation of Accrual Basic Application  
System (SAIBA) Using Delone & McLean  
Information System Success Model (Case Study of  
Stakeholders of KPPN Gorontalo and Marisa)).

Postur APBN Indonesia

The Indonesian Budget Overview, 2011

Anggaran pendapatan dan belanja negara &  
pedoman pelaksanaan APBN.

ICLSSEE 2022

*Direktorat  
Jenderal  
Anggaran  
Kementerian  
Keuangan RI*      *OMB No.  
3782024897614  
edited by*

## **DESIREE ANTONY**

Majalah MACEPACE  
Papua Barat Edisi  
Januari 2023 Direktorat  
 Sistem  
 Perbendaharaan,  
 Direktorat Jenderal  
 Perbendaharaan,  
 Kementerian Keuangan  
 MACEPACE akronim  
 dari Majalah Cerita  
 Pelaksanaan Anggaran  
 dan Capaian Ekonomi  
 merupakan sebuah  
 sarana publikasi dan  
 komunikasi terhadap  
 proses pengelolaan  
 keuangan negara,  
 capaian output dan  
 dampak ekonomi  
 kepada stakeholders  
 secara luas, dalam  
 bentuk media  
 sederhana yang  
 disusun oleh Kanwil  
 DJPb sesuai tugas dan  
 kewenangannya yang  
 bersinergi dengan  
 berbagai institusi  
 regional. MACEPACE  
 terbit setiap bulan dan

telah memiliki ISSN  
 yaitu 2807-2286  
Sistem Akuntansi  
Pemerintah pada  
Sistem  
Perbendaharaan dan  
Anggaran Negara  
 Direktorat Sistem  
 Perbendaharaan,  
 Direktorat Jenderal  
 Perbendaharaan,  
 Kementerian Keuangan  
 Indonesian Abstract:  
 Penelitian ini bertujuan  
 untuk mengevaluasi  
 sejauh mana  
 keberhasilan  
 implementasi aplikasi  
 SAIBA yang telah  
 berjalan selama ini  
 berdasarkan sudut  
 pandang pengguna  
 (user) dengan  
 menggunakan  
 pendekatan Delone &  
 McLean Information  
 System Success Model.  
 Sumber data yang  
 digunakan dalam  
 penelitian ini berasal  
 dari data primer dan  
 data sekunder. Data

primer berupa data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner yang dibagikan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dan disajikan oleh pihak-pihak lainnya seperti Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Gorontalo dan Marisa, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan lainnya. Dengan teknik simple random sampling dan pendekatan kuantitatif Pemodelan Persamaan Struktural atau Structural Equation

Modelling (SEM) berbasis komponen atau varian dengan Partial Least Square (PLS), penelitian ini menguji pengaruh indikator pengukuran kesuksesan penerapan sistem teknologi informasi aplikasi SAIBA berdasarkan model DeLone dan McLean (1992). Model ini menggunakan enam variabel pengukuran yaitu kualitas sistem (system quality), kualitas informasi (information quality), kepuasan pengguna (user satisfaction), penggunaan sistem (use), dampak individu (individual impact) dan dampak organisasi (organizational impact). Penelitian membuktikan secara empiris bahwa implementasi aplikasi SAIBA belum berjalan sukses berdasarkan

kriteria pengukuran sesuai model kesuksesan DeLone dan McLean (1992). Majalah MACEPACE Papua Barat Edisi Juni 2023 Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Selama beberapa dekade sebelum disahkannya peraturan perundang-undangan terkait penganggaran dan keuangan negara, Indonesia menggunakan sistem pengelolaan keuangan berdasarkan peraturan yang dibuat oleh pemerintah kolonial. Dengan perkembangan pelaksanaan keuangan pemerintah di berbagai negara dan tuntutan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan

reformasi pengelolaan keuangan negara dengan penyusunan landasan hukum pengelolaan keuangan negara. Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 merupakan komitmen bersama dalam memperbaiki sistem penganggaran negara. Pelaksanaan peraturan keuangan negara perlu didukung oleh sistem manajemen penganggaran dan perbendaharaan yang menunjang pelaksanaan tugas-tugas yang dibebankan oleh pemegang kekuasaan pengelola keuangan negara (presiden) baik kepada chief financial officer (CFO) sebagai Bendahara Umum Negara maupun chief operating officer (COO)

sebagai pengguna anggaran. Sebagai tindak lanjut penerapan sistem manajemen penganggaran maka diluncurkan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) sebagai wadah dalam menerapkan sistem manajemen penganggaran dan perbendaharaan negara. Modernisasi pengelolaan keuangan pemerintah memerlukan dukungan sistem informasi yang handal dan terintegrasi, mulai dari perencanaan anggaran, perbendaharaan dan pelaksanaan anggaran, pengelolaan utang, maupun pelaporan dan pengawasan. Sebagai bagian dari reformasi di bidang keuangan sejak tahun 2004 Departemen Keuangan

telah merencanakan untuk melakukan reformasi sistem informasi, khususnya di bidang perbendaharaan dan penganggaran. Rencana tersebut dibiayai dengan pinjaman dari Bank Dunia dalam payung Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP) di Departemen Keuangan. Salah satu unsur utama dalam GFMRAP tersebut adalah proyek Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN). SPAN adalah proyek jangka panjang yang menempatkan Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat Jenderal Anggaran sebagai leading institutions, meliputi pembangunan

sistem perbendaharaan dan anggaran negara yang sesuai dengan best practices yang diharapkan, dengan didukung oleh sistem informasi yang modern, baik yang terkait dengan software maupun hardware, melibatkan dan menghubungkan sistem informasi perbendaharaan dan anggaran di beberapa Eselon I di Departemen Keuangan, lima kementerian/lembaga negara di pusat, DPR, seluruh KPPN dan institusi pemerintah lainnya yang ditetapkan. Sistem pelaksanaan anggaran harus memenuhi sasaran dari Public Expenditure Management (PEM) yaitu pengawasan pengeluaran secara menyeluruh, alokasi

strategis dan efisiensi pelaksanaan. Dalam sistem pelaksanaan anggaran sebelumnya mengacu pada: fokus pada kepatuhan dan meyakinkan penerapan disiplin fiskal.

## **MANAJEMEN KEUANGAN SATUAN KERJA LUAR NEGERI**

Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan  
Buku ini disusun sebagai bahan masukan kepada unsur pimpinan pada Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran tentang pentingnya restrukturisasi manajemen keuangan pada satker luar negeri. Risiko kurs merupakan situasi nyata yang membayangi satker luar negeri.



Ketidaksetaraan informasi (asymmetric information) dan perbedaan mata uang (currency mismatch) adalah dua faktor penyebab risiko kurs pada pengelolaan keuangan satker luar negeri. Penyempurnaan proses bisnis merupakan upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko tersebut. Integrasi dan konsistensi arus informasi selama siklus anggaran dan optimalisasi RKUN valas yang dimiliki BUN merupakan pendekatan yang digunakan dalam restrukturisasi ini. Implementasi dari usulan pada buku ini akan membawa manfaat bagi banyak pihak yang terkait. Secara khusus, restrukturisasi ini akan

memperkuat fungsi treasury pada Ditjen Perbendaharaan. Mengingat perubahan yang diusung akan mengubah mind set dan kebiasaan, dibutuhkan dukungan penuh dari unsur pimpinan termasuk dari stakeholder yang terkait.

Cerita Tiga Menteri Menghadapi Krisis  
Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan  
Apa itu marketplace pemerintah? Apakah marketplace pemerintah sama dengan marketplace populer yang sudah ada? Apa teori yang mendasari pemanfaatan marketplace pemerintah? Apakah transaksi pada marketplace

pemerintah dipungut pajak? Siapa saja yang akan menjadi pengguna marketplace pemerintah? Apakah marketplace pemerintah akan merugikan usaha mikro, kecil, dan menengah? Bagaimana cara mengembangkan marketplace pemerintah? Buku ini disusun untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Beranjak dari riset berbasis studi kasus pada Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan, buku ini meletakkan landasan teori dan operasional pengembangan dan implementasi marketplace pemerintah di Indonesia. Pembahasan pada buku bersifat holistik yang meliputi aspek

hukum, model bisnis, dan teknologi. Memperkaya literatur manajemen keuangan publik, kebijakan fiskal, dan teknologi informasi, buku ini penting dibaca oleh banyak pihak: akademisi, pejabat keuangan di satuan kerja, kepala badan pengelola keuangan daerah, mahasiswa, pembuat kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, pelaku bisnis, pemeriksa pajak, auditor, peneliti, dan praktisi teknologi keuangan.  
*Majalah MACEPACE Papua Barat Edisi Agustus 2023* Postur APBN Indonesia On budget allocation in the state budget of Indonesia. Himpunan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang susunan organisasi dan

tata kerja Departemen Keuangan Rapat Dinas Kepala-Kepala Inspektorat dan Kepala-Kepala K. B. N. se Jawa dan Madura Dalam Membahas Masalah Pembayaran Pensiun Evaluasi Atas Implementasi Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Basis Akruwal (SAIBA) Dengan Pendekatan Delone & McLean Information System Success Model (Studi Kasus Mitra Kerja KPPN Gorontalo dan Marisa) (Evaluation on Implementation of Accrual Basic Application System (SAIBA) Using Delone & McLean Information System Success Model (Case Study of Stakeholders of KPPN Gorontalo and Marisa)). Indonesian Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana keberhasilan implementasi aplikasi SAIBA yang telah berjalan selama ini berdasarkan sudut pandang pengguna (user) dengan menggunakan pendekatan Delone & McLean Information System Success Model. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa data yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner yang dibagikan. Sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dan disajikan oleh pihak-pihak lainnya seperti Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara

Kementerian Keuangan, Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Gorontalo dan Marisa, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan dan lainnya. Dengan teknik simple random sampling dan pendekatan kuantitatif Pemodelan Persamaan Struktural atau Structural Equation Modelling (SEM) berbasis komponen atau varian dengan Partial Least Square (PLS), penelitian ini menguji pengaruh indikator pengukuran kesuksesan penerapan sistem teknologi informasi aplikasi SAIBA berdasarkan model DeLone dan McLean (1992). Model ini menggunakan enam variabel pengukuran yaitu kualitas sistem (system quality), kualitas informasi (information quality), kepuasan pengguna (user satisfaction), penggunaan sistem (use), dampak individu (individual impact) dan dampak organisasi (organizational impact). Penelitian membuktikan secara empiris bahwa implementasi aplikasi SAIBA belum berjalan sukses berdasarkan kriteria pengukuran sesuai model kesuksesan DeLone dan McLean (1992). Dasar-dasar praktek penyusunan APBN di Indonesia Manajemen Keuangan Anggaran Transfer ke Daerah pada Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara MACEPACE akronim dari Majalah Cerita Pelaksanaan Anggaran

dan Capaian Ekonomi merupakan sebuah sarana publikasi dan komunikasi terhadap proses pengelolaan keuangan negara, capaian output dan dampak ekonomi kepada stakeholders secara luas, dalam bentuk media sederhana yang disusun oleh Kanwil DJPb sesuai tugas dan kewenangannya yang bersinergi dengan berbagai institusi regional. MACEPACE terbit setiap bulan dan telah memiliki ISSN yaitu 2807-2286

**DIREKTORAT  
JENDERAL  
ANGGARAN DARI  
MASA KE MASA,  
1966-1999**

Kantor Wilayah  
Direktorat Jenderal  
Perbendaharaan  
Negara Provinsi Papua  
Barat

On budget allocation in the state budget of Indonesia.

*Administrasi keuangan Republik Indonesia*  
Direktorat Sistem Perbendaharaan,  
Direktorat Jenderal Perbendaharaan,  
Kementerian Keuangan  
MACEPACE akronim dari Majalah Cerita Pelaksanaan Anggaran dan Capaian Ekonomi merupakan sebuah sarana publikasi dan komunikasi terhadap proses pengelolaan keuangan negara, capaian output dan dampak ekonomi kepada stakeholders secara luas, dalam bentuk media sederhana yang disusun oleh Kanwil DJPb sesuai tugas dan kewenangannya yang bersinergi dengan berbagai institusi regional. MACEPACE terbit setiap bulan dan

telah memiliki ISSN yaitu 2807-2286 Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Papua Barat

Manajemen kas merupakan bagian dari wewenang Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara. Dalam pelaksanaannya, Menteri Keuangan menunjuk Direktorat Pengelolaan Kas Negara (PKN) sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara (BUN) di tingkat pusat. Pengelolaan kas di Direktorat PKN sebagai bagian dari fungsi treasury Ditjen Perbendaharaan telah mengalami banyak perubahan. Meski telah mengalami banyak peningkatan, disadari masih terdapat beberapa aspek

manajemen kas yang belum mencapai tahap yang diharapkan. Penyusunan modul ini dilaksanakan untuk memenuhi dua tujuan utama, yaitu untuk memetakan secara lengkap proses bisnis terkini yang dijalankan Direktorat PKN dalam menjalankan fungsinya sebagai Kuasa BUN Pusat, dan sebagai bagian dari upaya penyempurnaan atas proses bisnis yang telah dilaksanakan untuk kemudian dilakukan sinkronisasi dengan rencana implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) yang berbasis Oracle Finance. Disadari terdapat beberapa titik lemah pada manajemen kas yang perlu disempurnakan. Dalam proses perbaikan dan

penyempurnaannya, ditetapkan strategi yang sistematis, terencana dan menyentuh berbagai aspek dalam manajemen kas serta memperhatikan skala prioritas yang perlu mendapatkan perhatian.

**Himpunan  
keputusan Menteri  
Keuangan Republik  
Indonesia tentang  
susunan organisasi  
dan tata kerja**

**Departemen  
Keuangan** Kantor  
Wilayah Direktorat  
Jenderal  
Perbendaharaan  
Negara Provinsi Papua  
Barat  
Dalam pengembangan  
Sistem  
Perbendaharaan dan  
Anggaran Negara  
(SPAN) kebutuhan  
akan data dan  
informasi yang mudah  
dipertukarkan menjadi

sangat penting. Hal ini disebabkan SPAN merupakan upaya penyederhanaan Sistem Informasi Manajemen yang selama ini dikembangkan secara terpisah oleh masing-masing Direktorat Jenderal yang terlibat dalam SPAN. Selain itu, SPAN juga akan berinteraksi dengan Sistem Informasi lain baik sebagai penyedia data maupun sebagai pengguna data, sehingga kebutuhan untuk pertukaran data yang mudah dan aman menjadi sangat penting. Sesuai dengan Inpres Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government serta sejalan dengan upaya standarisasi format data dan informasi

yang saling dipertukarkan antara instansi pemerintah melalui IGASIS, maka penggunaan kode-kode yang hanya dimengerti oleh satu instansi sedapat mungkin dihindari. Hal ini dikarenakan, penggunaan kode-kode yang berbeda antar sistem aplikasi akan menyebabkan permasalahan keakuratan data yang dihasilkan (Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan:2008). Salah satu kode yang sering ada dalam sistem informasi di lingkungan pemerintah adalah kode lokasi. Kode lokasi sering kali merujuk pada pembagian wilayah secara administratif yakni mulai dari Provinsi, Kabupaten/Kota,

sampai dengan Kelurahan/Desa. Untuk beberapa sistem informasi, kode lokasi juga menunjukkan lokasi yang berada di luar negeri misalnya kode lokasi dalam Aplikasi DIPA. Kode Lokasi saat ini secara formal belum masuk dalam salah satu komponen Bagan Akun Standar (BAS) yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan, akan tetapi secara faktual, kode lokasi ini di pakai oleh beberapa aplikasi yang dikembangkan Ditjen Perbendaharaan dalam rangka Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban APBN. Dalam Rancangan Bagan Akun Standar yang akan digunakan dalam SPAN, kode lokasi merupakan salah satu elemen yang harus ada



dalam kombinasi akun (chart of account, atau disingkat CoA) dalam setiap transaksi dalam SPAN nantinya.

Dengan demikian, nantinya kode lokasi harus dinyatakan secara formal menjadi bagian dari Bagan Akun Standar yang digunakan oleh SPAN. Untuk memudahkan pertukaran data yang melibatkan kode lokasi antara SPAN dan sistem informasi selain SPAN ada baiknya digunakan kode lokasi yang lebih banyak digunakan dan telah diakui oleh pihak lain. Hal ini karena, kode lokasi yang digunakan dalam aplikasi yang dikembangkan oleh Ditjen Perbendaharaan memiliki perbedaan dengan pengkodean yang sudah banyak digunakan oleh sistem informasi di luar Ditjen

Perbendaharaan. Kode Lokasi yang dimaksud adalah kode lokasi yang dikembangkan oleh BPS (Badan Pusat Statistik). Alasan penggunaan kode lokasi BPS sebagai salah satu segmen BAS adalah kode ini sudah banyak dipakai oleh Sistem informasi lain yang ada di lingkungan Pemerintah Pusat RI, termasuk menjadi salah satu bagian dari Nomor Objek Pajak (NOP) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak.

**Interkoneksi Proses Bisnis Perbendaharaan pada Bendahara Umum Negara dengan Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan**

Negara Provinsi Papua Barat  
 This book contains the proceedings of the International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education (ICLSSEE 2022) on 16 April 2022 in Indonesia. This conference was held in collaboration between Nusantara Training and Research (NTR) with Borobudur University Jakarta, 17 Agustus 1945 University (UNTAG), and the Research and Development Agency of the Ministry of Home Affairs. The papers from the conference were collected in a proceedings book entitled: Proceedings of The International Conference on Law, Social Science, Economics, and Education (ICLSSEE

2022). The presentation of such a conference covering multi-disciplines will contribute a lot of inspiring inputs and new knowledge on current trending in Law, Social Science, Economics, and Education. Thus, this will contribute to the next young generation's researchers to produce innovative research findings. Hopefully, the scientific attitude and skills through research will promote the development of knowledge generated through research from various scholars in various regions. Finally, we would like to express our greatest gratitude to all the steering committee colleagues for their cooperation in administering and

arranging the conference. Hopefully, this seminar and conference will be continued in the coming years with many more insightful articles from inspiring research. We would also like to thank the invited speakers for their invaluable contribution and for sharing their vision in their talks. We hope to meet you again at the next conference of ICLSSEE.

*Laporan hasil kajian bidang hukum ekonomi pembangunan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Negara Provinsi Papua Barat*  
Pemanfaatan kartu kredit di lingkungan pemerintahan merupakan sebuah inovasi yang diusung oleh Direktorat

Jenderal Perbendaharaan sebagai upaya untuk memperbanyak payment channel (saluran pembayaran) atas beban APBN, meminimalisir penggunaan uang tunai serta mendukung perencanaan kas yang lebih baik. Berbagai manfaat dari penggunaan kartu kredit yang akan dirasakan langsung oleh berbagai pihak yang terlibat dan pada akhirnya akan membantu menggerakkan perekonomian nasional. Upaya mitigasi terhadap risiko penggunaan kartu perlu dilakukan untuk mencegah terjadinya potensi fraud baik dengan penyempurnaan proses bisnis, penguatan teknologi informasi dan

pembinaan sumber daya manusia yang terlibat. Dasar hukum penggunaan kartu kredit juga perlu disusun untuk memperkuat posisi penggunaan kartu kredit sebagai subsistem pembayaran pemerintah. Untuk mendapatkan pengalaman dan sebagai langkah awal untuk memperluas penggunaan kartu kredit pemerintah maka perlu dilakukan uji coba penggunaannya pada lingkup organisasi dan jenis belanja yang terbatas. Ditjen Perbendaharaan sebagai unit pertama yang melakukan uji coba penggunaan kartu kredit untuk membiayai perjalanan dinas akan berperan menjadi role model penggunaan kartu

kredit di lingkungan pemerintah. Penyempurnaan uji coba tersebut selanjutnya akan menjadi dasar untuk perluasan penggunaan kartu kredit pada jenis belanja dan instansi pemerintahan yang lebih luas.

**EVALUASI ATAS  
IMPLEMENTASI  
APLIKASI SISTEM  
AKUNTANSI  
INSTANSI BASIS  
AKRUAL (SAIBA)  
DENGAN  
PENDEKATAN  
DELONE & MCLEAN  
INFORMATION  
SYSTEM SUCCESS  
MODEL (STUDI  
KASUS MITRA KERJA  
KPPN GORONTALO  
DAN MARISA)  
(EVALUATION ON**

**IMPLEMENTATION OF  
ACCRUAL BASIC  
APPLICATION  
SYSTEM (SAIBA)  
USING DELONE &  
MCLEAN  
INFORMATION  
SYSTEM SUCCESS  
MODEL (CASE  
STUDY OF  
STAKEHOLDERS OF  
KPPN GORONTALO  
AND MARISA)).**

Direktorat Sistem  
Perbendaharaan,  
Direktorat Jenderal  
Perbendaharaan,  
Kementerian Keuangan  
Sejalan dengan  
rencana implementasi  
Sistem  
Perbendaharaan dan  
Anggaran Negara,  
idealnya dapat  
didukung dengan  
penyempurnaan proses  
bisnis pengelolaan dan  
pertanggungjawaban  
keuangan negara di

Satker. Pembahasan  
selanjutnya terkait  
kajian atas ketentuan  
pelaksanaan dan  
kemungkinan  
penyempurnaan  
kerangka pelaksanaan  
tugas dan tanggung  
jawab pejabat  
perbendaharaan di  
Satker, terutama yang  
berkaitan dengan  
aktivitas penyusunan  
laporan dan  
pertanggungjawaban.  
Sebagaimana diketahui  
pada saat ini di Satker  
terdapat dua  
mekanisme pelaporan,  
yaitu pelaporan dalam  
rangka akuntabilitas  
pelaksanaan  
kewenangan Kuasa  
Pengguna Anggaran  
yang dihasilkan oleh  
Unit Akuntansi Kuasa  
Pengguna Anggaran  
(UAKPA) sebagaimana  
diatur dalam PMK  
171/PMK.05/2007 dan  
Laporan  
Pertanggungjawaban

(LPJ) dalam rangka pertanggungjawaban pengelolaan uang oleh Bendahara sebagaimana diatur dalam PMK 73/PMK.05/2008. Postur APBN Indonesia Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

We construct the first comprehensive dataset of contingent liability realizations in advanced and emerging markets for the period 1990–2014. We find that contingent liability realizations are a major source of fiscal distress. The average fiscal cost of a contingent liability realization is 6 percent of GDP but costs can be as high as 40 percent for major financial sector bailouts. Contingent

liability realizations are correlated among each other and tend to occur during periods of growth reversals and crises, accentuating pressure on the budget during already difficult times. Countries with stronger institutions are able to better control and address the underlying risks so that they are less exposed to contingent liability realizations.

### **The Indonesian Budget Overview,**

**2011** Direktorat Sistem Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan

Sejalan dengan amanat Reformasi Keuangan Negara yang ditandai dengan lahirnya Paket UU di bidang Keuangan Negara, penerapan akuntansi berbasis

akrual di bidang pelaporan dan penganggaran berbasis kinerja di bidang perencanaan dan penganggaran menjadi hal penting yang mendasari pencapaian pengelolaan keuangan Negara sesuai dengan prinsip-prinsip good governance. Dalam siklus pengelolaan keuangan Negara tersebut, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran hingga pertanggungjawaban, diperlukan kodifikasi anggaran dan pelaporan keuangan yang saat ini berupa Bagan Akun Standar sebagai bentuk klasifikasi anggaran dan pelaporan keuangan. Terdapat amanat Undang-undang di bidang Keuangan Negara yang

sampai saat ini belum diimplementasikan secara penuh, antara lain adalah penerapan penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah pada aspek perencanaan dan penganggaran serta penerapan standar akuntansi berbasis akrual pada aspek pelaporan. Untuk mencapai beberapa poin penting tersebut telah dilakukan Reformasi Perencanaan dan Penganggaran yang mencakup Prioritas Nasional, Restrukturisasi Program dan Kegiatan, Penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja, Penerapan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah, serta Format Baru RKA-KL yang akan mulai diterapkan pada tahun

2010. Selain itu, pada bidang pelaporan, pelaksanaan penerapan SAP berbasis akrual ini secara signifikan akan berpengaruh terhadap Manajemen Aset Pemerintah, khususnya dalam desain Register Aset, dan pencantuman nilai aset di dalam neraca. Anggaran pendapatan dan belanja negara & pedoman pelaksanaan APBN. European Alliance for Innovation Reformasi di bidang keuangan Negara yang telah dilaksanakan sejak bergulirnya Undang-Undang Keuangan Negara dan Undang-Undang Perbendaharaan Negara dimulai dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Proses pengelolaan keuangan

negara selanjutnya dilaksanakan secara profesional, transparan dan akuntabel sebagai bagian dari pelaksanaan best practices (penerapan kaidah-kaidah yang baik) dalam rangka mendukung perwujudan good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Sejalan dengan semangat reformasi di bidang pengelolaan keuangan Negara, maka business process improvement adalah hal utama yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan Negara yang profesional, transparan dan akuntabel. Salah satu upaya untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Negara adalah dengan



pelaksanaan akuntansi atas transaksi keuangan Negara dan penyampaian laporan keuangan pemerintah yang andal dan tepat waktu. Hal ini dapat dicapai dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah, penerapan sistem pengendalian intern dan pelaksanaan akuntansi sesuai dengan sistem akuntansi pemerintah. *ICLSSEE 2022* International Monetary Fund Sistem pembayaran, yang merupakan suatu sistem dari rangkaian panjang pengeluaran negara, adalah sistem yang dimiliki Bendahara Umum Negara (BUN) dalam mengeluarkan uang dari rekening pengeluaran untuk keperluan pembayaran kepada yang berhak.

Saat ini sistem pembayaran dilakukan dengan metode tunggal yakni melalui penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang berfungsi sebagai bilyet giro yang menjadi dasar bagi bank untuk mendebit sejumlah dana pada rekening milik BUN dan memindahkannya ke rekening pihak ketiga. Dari rangkaian berbagai aktivitas pada sistem pembayaran, settlement SP2D merupakan akhir dari seluruh rangkaian pada sistem pembayaran. Tepat jumlah, tepat orang dan tepat waktu merupakan tiga elemen dasar yang harus dimiliki oleh sebuah sistem pembayaran. Proses penerbitan dan settlement SP2D sendiri telah

mengalami banyak penyempurnaan, seperti percepatan penerbitan SP2D dan penyampaian soft copy SP2D kepada Bank Operasional. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa potensi kelemahan yang perlu dicari solusinya. Dua kelemahan yang paling dirasakan adalah tidak dapat dipastikannya kapan aliran dana pencairan SP2D dapat diterima yang berhak serta kemungkinan terjadinya retur transaksi SP2D. Meski penyebab retur telah dapat diidentifikasi, namun sejauh ini belum terdapat upaya yang komprehensif dan tuntas untuk pencegahannya. Selain dua kelemahan tersebut, aktivitas settlement SP2D saat ini masih didominasi

dengan proses manual dan terlalu banyak membutuhkan intervensi manusia. Penulisan buku ini ditujukan untuk menghasilkan solusi yang sistematis dan upaya pencegahan atas berbagai permasalahan yang timbul.

Penyempurnaan settlement SP2D didasarkan atas penyempurnaan proses bisnis seluruh aktivitas yang terjadi dengan memanfaatkan teknologi informasi yang sudah berlaku umum di dunia perbankan. Untuk mencegah terjadinya retur - sebuah proses yang sangat memakan waktu dan biaya - diusulkan untuk menerapkan metode validasi atas data dan status rekening tujuan pembayaran dengan

menggunakan koneksitas dengan penyedia jaringan data perbankan. Untuk tujuan yang sama, perlu dilakukan penyempurnaan atas aplikasi satker berupa database rekening yang menyimpan data rekening pihak ketiga sehingga mengurangi aktivitas entry dan re-entry nomor rekening pada aplikasi satker termasuk pembangunan model aliran dan keamanan informasi data rekening dari satker kepada KPPN hingga diteruskan kepada pihak perbankan. Sejalan dengan penyempurnaan proses bisnis di atas, turut diusulkan untuk membangun relasi langsung antara rekening pengeluaran yang didebit dengan rekening penerima

dana, dengan cara membebankan Rekening Pengeluaran Kuasa BUN Pusat pada bank yang sama dengan bank pada rekening tujuan. Selain untuk mengurangi jumlah jaringan perbankan yang terlibat, juga untuk penyederhanaan jumlah rekening yang dikelola BUN dan sebagai sentralisasi settlement kas melalui Direktorat Pengelolaan Kas Negara. Implementasi berbagai usulan pada buku ini dibagi ke dalam dua periode, yakni sebelum Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan pada saat SPAN dijalankan. Periodesasi implementasi perlu dilakukan karena terdapat dua sistem yang berbeda pada

dua kurun waktu yang berbeda pula. Selain untuk mendapatkan pengalaman dari setiap aktivitas baru, periodisasi tersebut juga untuk memberikan jaminan bahwa seluruh usulan penyempurnaan dapat diimplementasikan dengan baik.

**MANAJEMEN  
KEUANGAN  
ANGGARAN  
TRANSFER KE  
DAERAH PADA  
SISTEM  
PERBENDAHARAAN  
DAN ANGGARAN  
NEGARA**

Tempo Publishing  
Postur APBN Indonesia  
Majalah MACEPACE  
Papua Barat Edisi  
Februari 2023 Kantor  
Wilayah Direktorat  
Jenderal  
Perbendaharaan  
Negara Provinsi Papua

Barat  
Pembangunan Sistem  
Perbendaharaan dan  
Anggaran Negara  
(SPAN) – yang akan  
menjadi sistem  
manajemen keuangan  
dalam pengelolaan  
APBN di tahun 2012 –  
akan membawa  
implikasi pada  
perubahan proses  
bisnis pengelolaan  
anggaran. Meski  
desain utama  
pembangunan SPAN  
berada pada Direktorat  
Jenderal  
Perbendaharaan  
(DJPBN) dan Direktorat  
Jenderal Anggaran  
(DJA), perubahan yang  
diusung akan  
berpengaruh pada  
proses bisnis di  
Direktorat Jenderal  
Perimbangan  
Keuangan (DJPK)  
selaku Kuasa  
Pegguna Anggaran  
Transfer ke Daerah.  
Hal tersebut adalah

suatu yang wajar mengingat bahwa nantinya seluruh mekanisme penganggaran dan penyaluran APBN akan melalui sistem dan prosedur yang terdapat pada SPAN. Di dalam kajian ini, poin-poin penting terkait perubahan proses bisnis pengelolaan Transfer ke Daerah adalah (i) pemberian akses langsung ke dalam SPAN secara real time dan online bagi pejabat/petugas pengelola anggaran Transfer ke Daerah pada DJPK, (ii) penggunaan kode satker dengan kode lokasi provinsi/kabupaten/kota penerima dana sehingga halaman II DIPA sudah terperinci per provinsi/kabupaten/kota, (iii) kode lokasi

sebagaimana disebut pada butir (ii) adalah mengacu pada kode daerah yang digunakan oleh Badan Pusat Statistik, (iv) reklasifikasi akun untuk tiap jenis anggaran Transfer ke Daerah dari satu akun menjadi beberapa akun dan (v) penyaluran dana bagi hasil didasarkan atas realisasi penerimaan. Kajian ini dibatasi pada cakupan pengelolaan transfer ke daerah yang saat ini menjadi tugas DJPK. Namun demikian, sebagai bagian dari Bagian Anggaran 999, anggaran Transfer ke Daerah mengambil porsi yang signifikan terhadap anggaran belanja negara. Dengan demikian, integrasi proses bisnis dan informasi pengelolaan Anggaran Transfer ke Daerah ke

dalam SPAN diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan pelayanan kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait. Keberhasilan pembangunan interkoneksi proses bisnis antara DJPK selaku satker dan SPAN, ke depannya, akan menjadi cikal bakal integrasi pengelolaan keuangan negara secara nasional.

[Integrasi Pelaporan Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara](#) Direktorat Sistem Perbendaharaan,

Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan MACEPACE akronim dari Majalah Cerita Pelaksanaan Anggaran dan Capaian Ekonomi merupakan sebuah sarana publikasi dan komunikasi terhadap proses pengelolaan keuangan negara, capaian output dan dampak ekonomi kepada stakeholders secara luas, dalam bentuk media sederhana yang disusun oleh Kanwil DJPb sesuai tugas dan kewenangannya yang bersinergi dengan berbagai institusi regional. MACEPACE terbit setiap bulan dan telah memiliki ISSN yaitu 2807-2286

Related with Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Ri:

[© Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Ri Fo76 Fire Breathers Exam](#)

© Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian  
Keuangan RI Fog Data Science Llc

© Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian  
Keuangan RI Focusrite Control User Guide